

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia kerja dimana mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan. Magang termasuk salah satu persyaratan kuliah yang memiliki bobot 4 sks dan juga syarat untuk membuat laporan akhir yang berpedoman pada hasil kegiatan magang tersebut.

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengaplikasian ilmu-ilmu secara teoritis yang telah didapat selama perkuliahan yang pengimplementasiannya dilakukan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini pula dapat memupuk disiplin kerja dan profesionalisme dalam bekerja agar dapat mengenal dunia atau lingkungan kerja yang akan bermanfaat bagi mahasiswa pada setelah menyelesaikan perkuliahan. Selain itu, kegiatan magang ini juga penting untuk diikuti oleh mahasiswa mengingat kebutuhan saat ini bukan hanya sekedar ilmu -

ilmu yang sifatnya teoritis, melainkan juga diperlukan suatu kegiatan yang dapat menambah ilmu - ilmu yang telah dipelajari sebelumnya pada saat kegiatan perkuliahan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yaitu APBD dan barang-barang inventaris milik daerah; dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pencatatan laporan keuangan pada pemerintahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Dalam suatu daerah terdapat dua jenis satuan kerja yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam SKPD terdapat dua prosedur transaksi akuntansi berupa prosedur akuntansi penerimaan kas dan akuntansi pengeluaran kas.

Akuntansi pemerintahan, merupakan pelaporan informasi yang tidak berorientasi pada perhitungan laba, melainkan penyediaan layanan publik yang mengisyaratkan akuntabilitas yang transparansi terhadap masyarakat selaku pengguna laporan keuangan. Hal ini berarti cakupan publikasi pelaporan akuntansi di pemerintahan sangat luas, tidak sebatas pengambil kebijakan saja.

Dalam pencatatan akuntansi di SKPD sistem dan prosedur yang digunakan berpedoman kepada Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga laporan keuangan yang digunakan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja, dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui akuntansi yang baik dan benar serta sesuai dengan

ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku agar laporan keuangannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya prosedur yang demikian, pada kesempatan kali ini penulis bermaksud membahas mengenai ***“Pencatatan Akuntansi Pada Bendahara Pengeluaran Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”***

Penulis mengambil judul ini dikarenakan keingintahuan penulis terhadap penatausahaan pencatatan akuntansi terhadap penerimaan, pengeluaran, pengakuan aset daerah dan ingin memahami apa saja dokumen yang terkait dalam pencatatan akuntansi pemerintah. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui alur kerja serta pencatatan akuntansi pada bendahara pengeluaran yang akuntabilitas dan transparansi yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

1.2 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi mata kuliah magang dan menyelesaikan salah satu syarat studi jurusan keuangan, konsentrasi pada keuangan negara dan daerah program Diploma II Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga nantinya memiliki wawasan, keterampilan dan pengetahuan serta motivasi yang tinggi dalam menghadapi era globalisasi dimasa yang akan datang.
3. Dapat melatih mahasiswa untuk berbaur mensosialisasikan diri dengan lingkungan dunia kerja, serta dapat menyesuaikan diri

terhadap perubahan-perubahan terkait dengan aplikasi dan ilmu teoritis dan juga dapat membandingkan antara pendekatan teori dengan praktik yang sebenarnya.

4. Melatih keterampilan dan mental mahasiswa agar menjadi lulusan yang memiliki kemampuan yang khusus dibidang masing-masing sehingga menghasilkan lulusan program diploma III yang berintelektual,berkualitas dan profesional.
5. Memahami dan menguasai dengan judul penulis tentang ***“Pencatatan Akuntansi Pada Bendahara Pengeluaran Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”***
6. Memberikan gambaran umum lingkungan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, sehingga penulis dapat mengetahui kemungkinan masalah serta kendala yang mungkin dihadapi dalam hal pencatatan akuntansi pada bendahara penerimaan/pengeluaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.3 Manfaat Magang

Magang merupakan kegiatan mahasiswa dalam dunia kerja dimana mahasiswa tersebut dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh secara garis besar dari kegiatan magang adalah :

1. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dibidang akuntansi pemerintahan.

2. Dapat mengetahui proses pencatatan akuntansi yang digunakan dalam menyusun sebuah laporan keuangan daerah.
3. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.
4. Mengetahui lebih dalam mengenal pencatatan akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas dan pengakuan aset daerah.
5. Memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan diri sendiri terhadap teori serta pengaplikasiannya di dunia kerja.
6. Sebagai persiapan dasar untuk menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu :

1. Bukti transaksi apa saja yang diperlukan dalam menyajikan laporan keuangan? Seberapa penting keberadaan bukti – bukti tersebut?
2. Bagaimana aplikasi Proses Akuntansi pada pemerintahan? Dan seperti apa kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi serta bagaimana cara mengantisipasinya?
3. Bentuk akhir dari sebuah siklus akuntansi adalah laporan keuangan, Laporan Keuangan pada pemerintahan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.5 Sistematika Dan Penulisan Laporan Magang

Untuk mempermudah memahami laporan magang, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat magang, perumusan masalah serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang defenisi akuntansi secara umum, akuntansi pemerintah, proses akuntansi secara umum.

BAB III GAMBARAN UMUM

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, visi dan misi serta struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang pencatatan akuntansi pada bendahara pengeluaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikaitkan dengan tujuan pembuatan laporan magang dan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.